

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2023

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO 54 BD 2023 /SETDA : 21 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 54 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAK : - Dalam rangka melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintah

- Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
- Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang Kelautan dan Perikanan; b. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang Kelautan dan Perikanan; c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Kelautan dan Perikanan; d. mengoordinasikan penyusunan laporan di bidang Kelautan dan Perikanan; e. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan f. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 oktober 2023
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.